

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018 penduduk merupakan semuaorang yang berdomisili diwilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Peningkatan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh tingkat kelahiran (fertilitas), penurunan tingkat kematian (mortalitas), dan migrasi.

Kota Malang merupakan Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang lebih di dominasi oleh mahasiswa Pemerintah Kota Malang mencatat jumlah perguruan tinggi yaitu sebanyak 59 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dibandingkan dengan Kota Surabaya yang didominasi oleh pendatang yang bekerja atau mencari kerja.

Kondisi jumlah penduduk Kota Malang Tahun 2005-2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2005-2017 yaitu jumlah penduduk Kota Malang cenderung meningkat. Pada awal tahun 2005 jumlah penduduk yaitu 772.642 ribu hingga tahun 2017 sebesar 861.414 ribu, penurunan jumlah penduduk hanya terjadi pada tahun 2010 yaitu 820.857 ribu dengan tahun sebelumnya sebesar 820.857 jiwa. Di Jawa Timur Kota yang menduduki jumlah penduduk terbanyak tiap tahunnya yaitu Kota Surabaya, sedangkan nomor dua terbanyak yaitu Kota Malang. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Surabaya sudah mencapai 2.874.699 jiwa.

Jumlah penduduk yang ada akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan daerah. Karena penduduk merupakan penggerak perekonomian daerah menurut Susanto (Fahmi & Jumiati, 2015). Tinggi rendahnya jumlah penduduk mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga bertambahnya pendapatan daerah dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduk (Todaro, 2004). Sektor penunjang perekonomian di Kota Malang seperti industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Dilihat dari kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Malang berdasarkan data tiga belas tahun mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 7,57%. Terlihat di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi yaitu 5,80% hingga tahun 2017 menjadi 5,69%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Malang berada pada kisaran 5% hingga 6%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah karena terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan ekonomi akan menambah penerimaan pendapatan daerah. Sebagai indikator perekonomian yang berhubungan dengan kondisi pasar, nilai inflasi berfluktuasi dengan pengaruh konsumsi masyarakat, kondisi barang yang beredar dan lainnya (Arianto & Padmono, 2014).

Inflasi merupakan terjadinya harga cenderung meningkat secara terus menerus dan menyeluruh (Saputra, 2018). Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya daya beli, sehingga konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa menurun karena secara riil tingkat pendapatan akan menurun.

Berdasarkan kondisi inflasi yang terjadi di Kota Malang berdasarkan Badan Pusat Statistik yaitu juga mengalami fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 15,74%. Pada tahun 2016 pemerintah berhasil menekan tingkat inflasi yaitu 2,62% dan tahun 2017 terjadi sedikit kenaikan yaitu sebesar 1,13% sehingga menjadi 3,75%. Berdasarkan Perkembangan Indeks Harga Konsumen / Inflasi Jawa Timur Desember Tahun 2017 Kota Madiun merupakan inflasi tertinggi di Jawa Timur yaitu mencapai 4.78%, diikuti Kota Surabaya yaitu 4.37% dan di urutan ketiga diikuti Kota Malang.

Jumlah industri juga ikut dalam menyokong peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah dan jumlah industri yang ada akan menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kota Malang memiliki banyak jumlah industri khususnya industri besar dan sedang.

Jumlah industri besar dan sedang Kota Malang diawali pada tahun 2005 sebanyak 190 industri hingga tahun 2017 jumlah industri besar dan sedang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya yaitu 2.685 industri. Penurunan jumlah industri terjadi pada tahun 2012 yaitu 71 industri.

Adanya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah industri Kota Malang Tahun 2005-2017 tersebut akan menambah pendapatan daerah khususnya penerimaan pajak daerah Kota Malang. Penetapan otonomi daerah berupaya meningkatkan kas melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didominasi oleh pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah akan memberikan kewenangan seluas luasnya, serta pemberian hak-hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.

Otonomi daerah dapat diselenggarakan melalui pemungutan sumber-sumber dari penerimaan suatu daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal

tersebut dapat digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan daerah sehingga terwujud pembangunan daerah.

Daerah otonom seperti Kota Malang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali potensi-potensi keuangan daerahnya sendiri. Penetapan otonomi daerah berupaya meningkatkan kas melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Malang terbesar bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah.

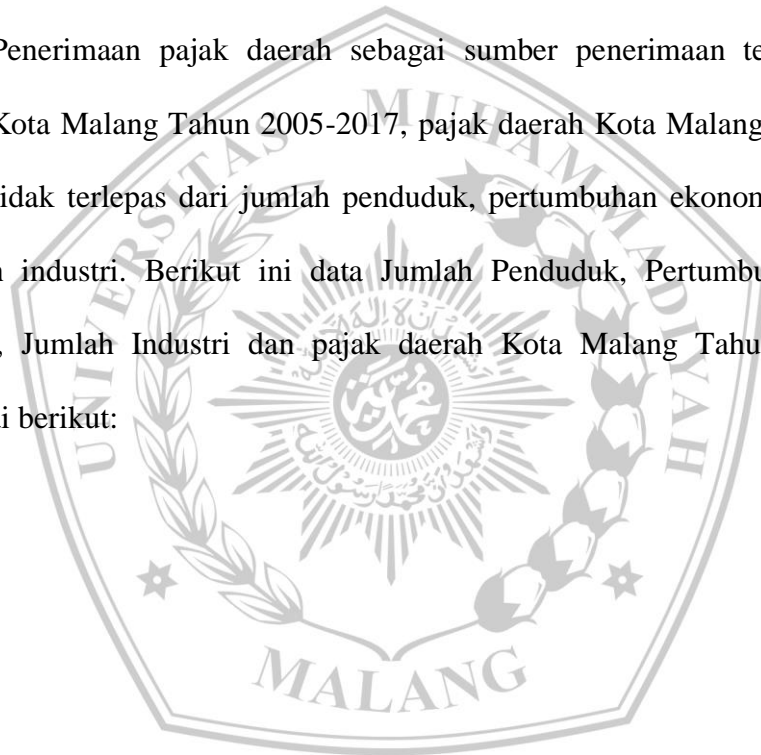


Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2005-2017

**Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2005-2017**

Berdasarkan grafik1.1 Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuatif dan penurunan yang sangat drastic terjadi pada tahun 2013 yaitu dengan nilai Pajak Daerah Rp 238.499.738,16, Retribusi Daerah Rp 38.460.785,95, Pengelolaan Daerah yang DipisahkanRp 16.571.050,91, dan Lain-Lain PAD yang sahRp 24.241.400,17. Penerimaan terbesar PAD Kota Malang Tahun 2005-2017 yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan terbesar dalam PAD Kota Malang Tahun 2005-2017, pajak daerah Kota Malang Tahun 2005-2017 tidak terlepas dari jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah industri. Berikut ini data Jumlah Penduduk, PertumbuhanEkonomi, Inflasi, Jumlah Industri dan pajak daerah Kota Malang Tahun 2005-2017, sebagai berikut:



**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Industri dan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2005-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Jumlah Industri	Pajak Daerah
2005	798104	4.25	15.74	190	Rp29,296,191,381.60
2006	807136	5.95	5.92	188	Rp32,123,673,031.21
2007	816444	5.98	5.93	197	Rp37,581,734,710.46
2008	816637	6.02	10.49	187	Rp 42,727,420,351.23
2009	820857	4.90	3.39	225	Rp 49,467,066,283.00
2010	820243	6.25	6.70	243	Rp 60,151,082,871.00
2011	828491	7.08	4.05	75	Rp 125,332,979,877.83
2012	834527	7.57	4.60	71	Rp 159,124,119,792.89
2013	840803	6.20	7.92	83	Rp 238,499,748.16
2014	845973	5.80	8.14	103	Rp 278,885,189.55
2015	851298	5.61	3.32	100	Rp 316,682,891.17
2016	856410	5.61	2.62	141	Rp 374,641,673.42
2017	861414	5.69	3.75	2685	Rp 414,961,528,718.04

Sumber: BPS Kota Malang dalam angka Tahun 2005-2017

Penerimaan pajak daerah Kota Malang sudah menunjukkan kenaikan tiap tahunnya dari tahun 2015 yaitu Rp29,296,191,381.60 juta hingga pada tahun 2012 sebesar Rp159,124,119,792.89 juta. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi Rp 238.499.738,16. Namun ditahun selanjutnya terus menunjukkan peningkatan hingga pada tahun 2017 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp414.961.528.718.04.

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Malang akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang, karena penduduk merupakan wajib pajak yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan teori

perpajakan bahwa besar atau kecilnya penerimaan dari sektor pajak sangat ditentukan pada jumlah penduduk menurut Mugrave (Haniz & Sasana, 2013). Terjadinya peningkatan jumlah pendudukan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga dapat mendorong perekonomian dan juga memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah karena penduduk juga merupakan subjek pajak dan perekonomian.

Jika aktifitas ekonomi masyarakat semakin dinamis akan menstimulus pendapatan daerah dari pajak daerah yang dibayar masyarakat melalui kegiatan ekonomi, sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, maka akan meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak, karena adanya support financial pembangunan yang berasal dari rakyat (Saputra, 2018). Maka dari itu pertumbuhan ekonomi Kota Malang dari tahun 2005-2017 yang fluktuatif cenderung pada angka 5% hingga 6% ikut mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Malang yang juga fluktuatif.

Pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat juga begitu juga dengan tingkat inflasi sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Menurut (Mispiyanti & Kristanti, 2018) mengatakan bahwa dengan adanya penurunan inflasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena adanya pertumbuhan penerimaan suatu negara karena terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat.



Diperkuat oleh Wantara (Haniz & Sasana, 2013) bahwa laju inflasi juga akan mempengaruhi besar atau kecilnya penerimaan sektor pajak. Nilai inflasi Kota Malang Tahun 2005-2017 yang mengalami fluktuatif dan ditahun tahun terakhir pemerintahpun mampu menurunkan tingkat inflasi, sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Malang Tahun 2005-2017 yang juga mengalami fluktuatif.

Selanjutnya Jumlah Industri besar dan sedang Kota Malang juga mengalami fluktuatif. Kenaikan jumlah industri besar dan sedang di tahun 2017 yang sangat signifikan begitu juga dengan penerimaan pajak daerah juga mengalami fluktuatif dan kenaikan yang sangat signifikan juga terjadi di tahun 2017. Banyaknya jumlah industri besar dan sedang disuatu daerah akan menambah wajib pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah akan bertambah melalui pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Rofik, 2013) menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat dirumuskan adalah apakah jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang tahun 2005-2017?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi,

inflasi dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang Tahun 2005-2017 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang Tahun 2005-2017.

### **D. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan sehingga dilakukan pembatasan. Permasalahan yang dibatasi dalam penelitian ini yaitu mengutamakan pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah dengan objek penelitian yaitu Kota Malang dari tahun 2005 hingga tahun 2017.

Data Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dan Jumlah industri yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jumlah industri besar dan sedang. Sedangkan data penerimaan Pajak daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Indonesia.

2. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau literature mengenai penerimaan pajak daerah.

